



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

DOKUMEN
RANCANGAN AKHIR
**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2024



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 891 / 3598 / DKP/ V /2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tercapainya pembangunan yang terarah dan terencana serta tersedianya dokumen rencana kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar maka dipandang perlu penetapan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menerapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
25. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022-2024;
26. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
27. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi;
28. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah;
29. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen;
30. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 109 Tahun 2016);
33. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111).
34. Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 94).
35. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 (Berita Daerah tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024;**
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar tentang Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024;
- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar menjadi Pedoman Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Makassar,



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP, M.Si

Pangkat/Gol. : pembina Tk. I / IV.b

NIP : 19820930 200012 1 002

Tembusan Kepada, Yth. :

1. Masing-Masing yang Bersangkutan;
2. Pering

KATA PENGANTAR

Dengan segenap keikhlasan, kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 dapat disusun sesuai dengan rencana.

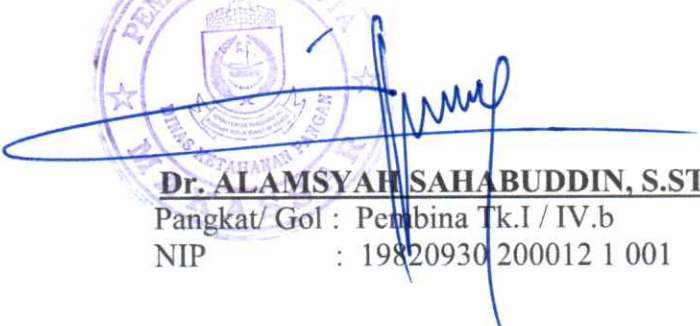
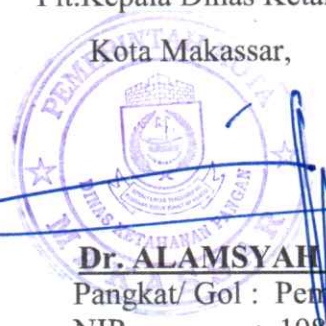
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi program dan kegiatan, lokasi kegiatan, serta indikator kinerja perubahan untuk mencapai sasaran di tahun berjalan. Dokumen ini menjadi acuan pelaksanaan kerja tahun 2024 yang mengalami perubahan akibat kebijakan pimpinan. Seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini. Langkah ini diperlukan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan ketahanan pangan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Namun demikian, kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas rencana kerja yang diinginkan dalam sisa waktu di tahun berjalan ini. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Makassar, 6 Agustus 2024

Plt.Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kota Makassar,



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP,MSi

Pangkat/ Gol : Pembina Tk.I / IV.b

NIP : 19820930 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan TW II Tahun 2024	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	22
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	25
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN	39
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	9
Tabel 2.2.	Form T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	23
Tabel 2.4.	Form T-C 31 Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	28
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassa Makassar	37
Tabel 3.1.	Matriks Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan 2024	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Form T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2024 Kota Makassar	65
Lampiran 1.	Rencana Akhir RKPD Perubahan TA. 2024	69
Lampiran 2.	Lembar Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen Renja Perubahan ini juga bertujuan untuk mencapai harmonisasi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumber daya manusia pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dalam kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan serta pembangunan jangka menengah daerah kota Makassar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, bahwa perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Pada pelaksanaan renja di tahun berjalan, terdapat penyesuaian, sehingga disusunlah Renja perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang merupakan dokumen perubahan atas kebijakan dalam melaksanakan kegiatan, baik berupa (a). Perubahan Kebijakan Pemerintah, berupa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan keamanan dan ketersediaan pangan memerlukan adaptasi dalam rencana kerja, (b). Kualitas dan Keamanan Pangan dimana Isu-isu terkait kualitas dan keamanan pangan yang memerlukan perhatian dan tindakan segera, (c). Penilaian terhadap keberhasilan dan kelemahan program-program yang telah dijalankan sebelumnya maupun (e). Perubahan atas Pagu Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja 2024, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 dan Rencana Akhir Perubahan RKPD 2024, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 juga tidak terlepas dari Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang sudah dicanangkan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan, pergeseran anggaran terhadap kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan seiring kondisi saat ini. Peranan dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung ekonomi Kota Makassar pada era globalisasi sekarang ini perlu ditunjang oleh kebijakan dalam program yang lebih terarah dan lebih tajam dalam penyediaan pangan baik. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus bersifat antisipatif dan responsif sesuai dengan perkembangan serta dinamika zaman. Demikian pula dengan program yang akan dilaksanakan harus pragmatis, terukur, memberikan dampak serta berkesinambungan untuk dapat menjawab permasalahan ketahanan Pangan Kota Makassar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan RENJA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
22. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022-2024;
23. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
24. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi;
25. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah;

26. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen;
27. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 109 Tahun 2016);
30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111).
31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 94).
32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2024 Tanggal 29 Juli Tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Perubahan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Ketahanan Pangan Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Walikota Makassar yang memuat arah kebijakan untuk peningkatan ekonomi dan kegiatan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kota Makassar;
2. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 di Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar sesuai tugas dan fungsinya;
3. Sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sementara tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sinergitas dan penyelarasan program dan kegiatan RKPD dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 ;
2. Menjadi sarana pengendalian program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD ke Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar;

- 3. Sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) dan PPAS perubahan yang akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab	Pendahuluan
I.	Pada Bab ini memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Berisikan antara lain : 1.1. Latar Belakang, yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-P OPD, proses penyusunan Renja-P OPD, keterkaitan antara Renja-P OPD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan 1.2. Landasan Hukum, yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Ketahanan Pangan; 1.3. Maksud dan Tujuan, yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan; dan (4) Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-P Dinas Ketahanan Pangan, serta susunan garis besar isi dokumen; 1.4. Sistematika Penulisan, memuat tata cara penulisan Renja-P Dinas Ketahanan Pangan.
Bab II.	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Pada bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang mengungkapkan dan menggambarkan, serta memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n1) dan perkiraan capaian tahun berjalan memuat progress dan permasalahan semester I serta proyeksi pencapaian target kinerja semester II baik fisik maupun keuangan. Berisikan antara lain : 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan TW II Tahun 2023 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD



	2.4. Review terhadap Rencana Akhir RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III.	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
Bab IV	Penutup Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan TW II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2024 Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar sampai Triwulan II, dimana telah melaksanakan 5 (Lima) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan, yang terdiri atas 1 (Satu) program Penunjang/Pendukung, 6 (enam) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dan 4 (empat) program utama, 7 (tujuh) kegiatan, 14 (empat belas) sub kegiatan.

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa akan datang.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 telah melewati Triwulan II. Sebagian program dan kegiatan yang tertuang dalam buku Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2024 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi.

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
(Form E- 81)

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
			4.2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						
2 09 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persen	90		100	90	25.671.232.192	24.555.393.432		1.338.000.100		2.578.071.121		3.914.071.221	42,80	15,94						
		Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja	Persen	100	7.324.857.825	100	6.560.905.167	7.790.923.192	8.695.297.632	8	1.072.007.781	32	1.713.960.314	40,00	2.785.968.095	44,44		140,00	9.346.874.262	155,56			
		Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	90		99,33	90			15,6		21,27		36,87	36,87	32,04		136,87	136,87	127,60			
										13,00		16,70		29,70	33,00			129,03	143,37				
2 09 1 2 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	219.406.000	11	79.610.000	12	168.900.000	217.170.100	3	46.300.000	1	15.500.000	4	61.800.000	33	28,46	15	141.410.000	125	64,45	
2 09 1 2 0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	159.520.000	2	17.900.000	2	142.000.000	147.273.500	1	38.300.000	0	3.500.000	1	41.800.000	50	28,38	3	59.700.000	150	37,42	
2 09 1 2 0 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	9.684.000	1	2.800.000	2	5.000.000	12.091.400	0	0	1	3.500.000	1	3.500.000	50	28,95	2	6.300.000	100	63,10	
2 09 1 2 0 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	9.161.000	1	2.400.000	2	5.000.000	12.293.500	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	40,66	1	7.400.000	50	80,78	
2 09 1 2 0 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	9.595.000	1	1.200.000	2	5.000.000	10.873.300	1	3.500.000	0	0	1	3.500.000	50	33,10	2	4.700.000	100	48,98	
2 09 1 2 0 1 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	9.005.000	1	1.200.000	2	5.000.000	10.853.300	0	0	0	0	0	0	0,00	1	1.200.000	50	13,33		
2 09 1 2 0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	22.141.000	1	5.600.000	4	6.000.000	24.350.100	1	4.500.000	0	3.500.000	1	8.000.000	25	32,85	2	13.600.000	50	61,42	

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
			4a		5		7			8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12*100		14 = 8+12		15 = 14*100		16	17	
20901202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6.097.047.000	90	4.061.643.877	100	5.582.241.092	6.285.061.132	16,80	854.571.406	19,60	1.405.974.314	36,40	2.260.545.720	36,40	35,97	126,70	6.322.189.597	126,70	103,69		
20901202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	33	5.784.049.000	32	3.585.723.877	33	5.097.501.092	5.810.530.732	40	751.191.406	40	1.293.594.314	40,00	2.044.785.720	121	35,19	72	5.630.509.597	216	97,68		
20901202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	134.640.000	1	295.920.000	1	276.240.000	268.090.000	0	58.380.000	0	67.380.000	0	125.760.000	0	48,91	1	421.660.000	100	313,19		
20901203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	188.000.000	1	180.000.000	12	180.000.000	188.645.700	3	45.000.000	2	45.000.000	5	90.000.000	42	47,71	6	270.000.000	50	160,71		
20901206	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	8	18.329.000	0	0	8	18.200.000	8.678.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
20901208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	12.029.000	0	0	2	12.300.000	8.926.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00			
20901205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	324.000.000	82,50	566.576.080	100	408.000.000	495.000.000	8,00	35.647.075	28,40	66.693.540	36,40	102.340.615	36,40	20,67	118,90	669.016.695	118,90	206,49		
20901209	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	324.000.000	64	519.278.080	100	408.000.000	495.000.000	4	35.647.075	6	66.693.540	10	102.340.615	10	20,67	74	621.616.695	74	191,66		
20901206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	371.533.825	92,90	979.161.712	100	1.254.783.400	1.144.917.500	7,20	51.400.000	32,80	137.196.660	40,00	188.596.660	40,00	16,47	132,90	1.167.758.372	132,90	314,31		
20901202	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	59.993.825	0	227.905.000	4	222.841.800	200.047.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	227.905.000	0	379,88		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024	
		Jumlah waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	0		12		0			0	0	0	0	0									
20901204	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	21.800.000	0	174.278.212	2	231.681.600	153.663.000	1	0	0	1	50	38,71	1	233.766.212	50	1062,25		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024		
		Jumlah Waktu Penyediaan bahan Logistik Kantor	Bulan	0		12		0			0	0	0	0										

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab	Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
				4 a	5	6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
209120606	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket	1	13.940.000	0	15.150.000	1	13.920.000	5.867.400	0	0	0	0	0,00	0	15.150.000	0	108,68		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024			
		Jumlah waktu Penyediaan Bahan Percetakan dan Penggandaan	Bulan	0		12		0			0		0											
209120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	0	173.000.000	16	132.093.700	0	476.000.000	496.000.000	0	0	0	86.208.680	86.208.680	0,00	0	218.302.360	0,00	126,19	Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	42		0		132.093.700			42		0			8	8		19,05			8	19,05	
209120611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi Pendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi	0	103.000.000	2	414.884.800	0	310.340.000	289.340.000	0	13.500.000	0	29.400.000	42.900.000	0	0	457.784.800	0	444,45	Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024			
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4		0		4			1		1			2	50		2			50		
2091208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	25.215.000	82	313.306.448	100	108.004.100	389.052.900	21,00	74.064.800	18,00	75.881.800	39,00	149.946.600	39,00	38,54	121,30	463.253.048	121,30	1837,21		
209120804	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12.000.000	0	6.396.319	1	56.200.000	56.200.000	0	6.584.800	0	7.831.000	14.395.900	0	0	20.792.119	0	173,27	Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024			
		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi	Bulan	0		12		0			0		0											
209120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	13.215.000	0	45.657.200	1	49.604.100	320.852.900	0	87.500.000	0	66.050.800	135.550.800	0	0	181.406.000	0	1372,74	Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024			
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Bulan	0		12		0			0		0											

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.		
				4.a	5	6	7	8		9		10 = 8+9+10+11		11 = 12/7*100		12 = 6+12		13 = 14/5*100		16	17					
20901209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	287.656.000	90	153.998.050	100	269.994.600	164.096.000	10,70	10.024.500	15,30	12.714.000	26,00	22.738.500	26,00	13,86	116,00	176.736.550	116,00	61,44				
2090120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	89.284.000	1	35.571.550	1	40.002.100	31.916.000	1	3.874.500	1	4.914.000	1	8.788.500	100	27,54	2	44.360.050	200.00	49,68				
2090120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	187.392.000	12	71.633.000	12	177.802.500	74.990.000	4	6.150.000	0	7.800.000	4	13.950.000	33.33	18,00	16	85.883.000	133.33	45,83				
2090120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	10.980.000	60	46.493.500	19	51.190.000	57.190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	90	46.493.500	315,79	423,44				
															Rata-rata capaian		38,10		32,04							
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah							
Faktor Penghambat - Pencairan Kegiatan yang bersifat rutin belum on date mengikuti keluarnya SPD dari BPKAD - Proses Belanja e-catalogue yang memerlukan waktu dalam proses belanja - Proses pencairan TPP mengalami penumpukan di akhir sehingga mengakibatkan mengalami keterlambatan pencapaian realisasi																										
Faktor pendorong - Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang sifatnya rutin dikerjakan setiap bulannya - Dukungan sumber daya dan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan - Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang diharapkan, dengan dukungan stakeholder terkait dan staf ASN dan Non ASN																										
Tindak Lanjut - Perencanaan pemanfaatan anggaran yang on schedule - Peningkatan SDM pada sub bagian perencanaan - Diperlukan evaluasi tap bulannya terhadap penyerapan anggaran - Dalam penyerapan anggaran sebaiknya menyesuaikan dengan alur kas																										
20902	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	92	171.799	130,67	4.500.000	92	72.900.000	52.000.000	10	0	44	36.950.920	54,35	36.950.920	59,08	71,06	185	41.450.920,00	201,11	0				
2090201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	15	0	15	4.500.000	15	72.900.000	52.000.000	0	0	2	36.950.920	2	36.950.920	13	71,06	17	0	113	0				
2090203	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	1	0	0	4.500.000	1	72.900.000	52.000.000	0	0	0	36.950.920	0	36.950.920	0	71,06	0	0	0	0				



Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
				4.a	5	6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10*11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100			16		
20910209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	287.656.000	90	153.996.050	100	268.994.600	164.096.000	10,70	10.024.500	15,30	12.714.000	26,00	22.738.500	26,00	13,86	116,00	176.736.550	116,00	61,44		
20910209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	89.284.000	1	35.571.550	1	40.002.100	31.916.000	1	3.874.500	1	4.914.000	1	8.788.500	100	27,54	2	44.360.050	200,00	49,68		
20910209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	187.392.000	12	71.933.000	12	177.602.500	74.990.000	4	6.150.000	0	7.800.000	4	13.950.000	33,33	18,60	16	65.883.000	133,33	45,63		
20910209	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	10.980.000	60	46.493.500	19	51.190.000	57.190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60	46.493.500	315,79	423,44		
																Rata-rata capaian	38,10	32,04						
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Faktor Penghambat	- Pencapaian Kegiatan yang bersifat rutin belum on date mengikuti keluarnya SPD dan BPKAD - Proses Belanja e-catalogue yang memerlukan waktu dalam proses belanja - Proses pencapaian TPP mengalami penumpukan di akhir sehingga mengakibatkan keterlambatan pencapaian realisasi																						
	Faktor pendorong	- Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang sifatnya rutin dikerjakan setiap bulannya - Dukungan sumber daya dan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan - Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang diharapkan, dengan dukungan stakeholder terkait dan staf ASN dan Non ASN																						
	Tindak Lanjut	- Perencanaan pemanfaatan anggaran yang on schedule - Peningkatan SDM pada sub bagian perencanaan - Diperlukan evaluasi tiap bulannya terhadap penyerapan anggaran - Dalam penyerapan anggaran sebaiknya menyesuaikan dengan alur kas																						
20920201	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	92	171.799	130,67	4.500.000	92	72.900.000	52.000.000	10	0	44	36.950.920	54,35	36.950.920	59,08	71,06	185	41.450.920,00	201,11	0		
20920201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	15	0	15	4.500.000	15	72.900.000	52.000.000	0	0	2	36.950.920	2	36.950.920	13	71,06	17	0	113	0		
20920201	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	1	0	0	4.500.000	1	72.900.000	52.000.000	0	0	0	36.950.920	0	36.950.920	0	71,06	0	0	0	0		
																Rata-rata capaian	75,00	71						
																Predikat Kinerja	Sedang	Sedang						
	Faktor Penghambat	Masih dalam tahap pengumpulan data Ketersediaan Pangan Utama																						
	Faktor Pendorong	Dukungan data Ketersediaan Pangan Utama dari penggiliran beras yang ada di Wilayah Kota Makassar																						
	Tindak Lanjut	Melakukan Koordinasi ke Provinsi Sulawesi Selatan dan ke Bapasas terkait dengan Ketersediaan Pangan Utama																						



Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
			4.a	5	6	7	8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17				
2093	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	Lorong	500	12.784.366.866	619	15.217.255.019	500	16.634.094.300	14.884.105.500	55	214.492.319	129	623.308.043	184	837.800.362	37	5,63	803	16.055.055.381	160,60	125,58		
Jumlah Skill Training Gratis		Orang	200	100		200		20			92		112		56		212		106					
Ketersediaan Energi		kkal/kapitahun	2700	2.782		2.700		0			2019		2019		75		4801		177,81					
Ketersediaan Protein		grikapitahun	127	81		127		0			54,67		54,67		43		135,36		106,58					
Skor PPH		poin	85	89,60		85		0			0		0,00		0		89,60		105,41					
2093201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Ketersediaan Energi dan Protein serta Stok Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	712.490.468	1	320.341.385	1	568.945.000	581.217.500	0	68.000.000	0	91.705.800	0	159.705.800	0	27,48	1	480.047.185	100	67,38		
2093203	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Dokumen Data Produksi dan Konsumsi Sumberdaya Pangan Lokal	Dokumen	0	210.052.000	1	123.941.385	0	144.889.200	171.834.900	0	35.000.000	0	53.145.800	0	63.145.800	0	36,79	0	187.087.185	0	89,07		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	12		0		12			3		3		6		50		6		50			
2093204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	18	138.371.498	0	179.000.000	18	243.345.000	189.477.200	4	33.000.000	3	43.310.000	7	76.310.000	44	40,27	7	255.310.000	44	184,51		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024
		Jumlah Dokumen Data Produksi dan Konsumsi Sumberdaya Pangan Lokal	Dokumen	0		1		0			0		0		0		0		0		0			
2093206	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	384.067.000	1	17.400.000	1	325.800.000	220.105.400	0	0	0	20.250.000	0	20.250.000	0	9,20	1	199.250.000	100	502,44		
2093202	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah	Ton	93	85.000.000	73	418.074.000	93	325.800.000	327.200.800	0	4.500.000	0	4.500.000	0	9.000.000	0	2,75	73	427.074.000	78,49	502,44		
2093203	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	Ton	20	85.000.000	37	418.074.000	20	325.800.000	327.200.800	0	4.500.000	0	4.500.000	0	9.000.000	0	2,75	37	427.074.000	185,00	502,44		
2093204	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Lokasi Analisa Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Kota	1	11.986.866.398	1	14.478.839.634	1	15.739.349.300	13.975.687.200	0	141.992.319	0	527.102.243	0	669.094.562	0	4,79	1		100	0,00		



Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
			3	4	4.a	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17						
209032041	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1		0		1			0			0										
		Jumlah Lokasi Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kecamatan	0	105.644.740	15	116.450.000	112.450.000	96.300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	116.450.000	0,00	110,23		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024			
209032042	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	23		0		23			5		4	9	39	9	39,13							
		Jumlah Lokasi Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kecamatan	0	11.731.141.790	15	13.985.621.076	15.264.959.300	13.532.437.200	141.992.319	450.702.809	592.695.128	4,38	14.558.316.204	124,10						Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024			
209032043	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	6		0		6			0	1	1	17	1	17								
		Jumlah Kegiatan atau Pameran dalam Penyebaran Informasi Produk Pangan	Pameran	0	150.079.888	5	395.768.558	341.900.000	348.950.000	0	0	0	76.399.434	0	76.399.434	0	22,02	0	473.167.992	0	315,28	Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024		
		Jumlah Lokasi Peserta B2SA Kreasi Pangan Lokal	Kecamatan	0		15		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		38,67	5,63								
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Faktor Penghambat	-Masih kurangnya sarana dan Prasarana yaitu berupa kendaraan yang mengangkut bahan pangan ke lokasi GPM (Gerakan Pangan Murah) -Data dari beberapa SKPD secara teknis masih dalam proses Rekapitan -kegiatan pengambilan data konsumsi harian masyarakat Menyusutkan Alur Kas -Belum terpenuhinya jumlah usulan kelompok calon penerima bantuan dari Kelurahan -Kegiatan sudah terlaksana untuk 1 kali pameran dan selanjutnya Menyusutkan dengan alur kas dan menunggu informasi pelaksanaan pameran selanjutnya																						
	Faktor Pendorong	- kegiatan pengambilan data konsumsi harian masyarakat, faktor pendorong nya data Konsumsi harian Masyarakat sudah didukung Data SUSENAS yang nandi disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan - lorong wisata dan Pelatihan Teknis Pengankaragaman Pangan Berbahas Baku Lokal. Faktor pendorongnya adalah (1) kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan berdasarkan visi misi Walikota Makassar tahun 2021 - 2026 tentang peningkatan lorong garden dan pembentukan 5.000 lorong wisata, (2) Kontribusi pihak ketiga dari universitas, Bank Indonesia dan rekanan yang tinggi demi kemajuan pangan di Kota Makassar dan (3) Adanya kesadaran masyarakat selama masa pasca pandemi untuk mendapatkan hasil pangan dengan pemanfaatan lahan perkawangan sendiri.																						
	Tindak Lanjut	- Saat ini sedang berjalan kegiatan monitoring dan verifikasi usulan kelompok lorong wisata tahun anggaran 2024 dan koordinasi bersama penyuluh dan pihak kelurahan rekapitulasi pemenuhan usulan lorong wisata tahun Anggaran 2025 -Memberikan Akses mudah dan terjangkau kepada masyarakat untuk mendapatkan pangan murah yang dapat mengurangi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas harga. kegiatan Gerakan Pangan Murah yang di laksanakan di 15 kecamatan dan 153 kelurahan setiap sekali seminggu untuk pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan. -Kegiatan Pengambilan data PPH rencana dilaksanakan pada Triwulan III																						
20904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	11,76	382.426.400	17,64	312.887.534	11,76	314.064.400	413.233.000	0	24.500.000	0	98.214.600	0,00	122.714.600	0	29,70	17,64	435.602.134	150,00	113,90		
20904201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan	Dokumen	0	232.164.400	1	134.350.000	0	202.290.000	181.095.000	0	7.000.000	0	79.601.200	0	86.601.200	0	47,82	0	220.951.200	0	95,17	Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024	
		Laporan	1		0		1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab	Ket	
										I		II												
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
			4.a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
2094201	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	232.184.400	1	134.350.000	1	202.290.000	181.099.000	0	7.000.000	0	79.601.200	0	86.601.200	0	47,82	1	220.951.200	100	95		
2094202	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Penangan Daerah Rawan Pangan	Laporan	1	150.262.000	1	178.537.534	1	314.064.400	232.134.000	0	17.500.000	0	18.613.400	0	36.113.400	0	15,56	1,00	214.650.934	100	142,85		
2094202	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	70.038.000	0	0	1	75.884.400	75.367.600	0	13.500.000	0	13.613.400	0	27.113.400	0	35,97	0	27.113.400	0	38,71		
		Jumlah Lokasi Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024	
2094203	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Dokumen	0	80.224.000	1	178.537.534	0	238.200.000	156.786.400	0	4.000.000	0	5.000.000	0	9.000.000	0	5,74	0	187.537.534	0	234		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024
		Laporan	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
															Rata-rata capaian		40,00	29,70						
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Faktor Penghambat	- Data dan skpd terkait masih bulan Desember tahun 2023. Data tersebut diperoleh dari hasil olah data dari SKPD penyedia data - Belum adanya intruksi dari pemerintah daerah untuk penyaluran Cadangan Pangan dan penyaluran berdasarkan perwali cadangan pangan, kegiatan ini akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan - Data dari skpd terkait masih bulan Desember tahun 2023. Data tersebut diperoleh dari hasil olah data dari Dinas Kesehatan																						
	Faktor pendorong	- Data valid dari skpd terkait sangat mendukung hasil analisis data fsva - Bulog Sub Divre Makassar mendukung dalam pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan - Dukungan kesiapan data dan skpd terkait mengenai data indikator penyusunan skpd 2024																						
	Tindak Lanjut	- Koordinasi dengan skpd terkait terhadap hasil analisis dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk intervensi daerah rawan pangan - Koordinasi dengan Bulog selaku penyedia pangan untuk pelaksanaan penyaluran cadangan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan di masyarakat. - Konsultasi dengan SKPD terkait dalam penyediaan data terkait penanganan daerah rawan pangan.																						



Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. RENJA	Rp. (000) DPA	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
			4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
2095	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	94	309.112.200	100	1.376.178.481	94	889.250.300	510.727.300	11,70	27.000.000	14,30	103.637.244	26,00	130.637.244	28	25,58	126,00	1.506.815.725	134,04	487,47		
209521	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Laporan	1	309.112.200	1	1.376.178.481	1	889.250.300	510.727.300	0	27.000.000	0	103.637.244	0	130.637.244	0	25,58	1	1.506.815.725	100	487,47		
20952104	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1	285.993.200	166.974.100	0	0	0	13.500.000	0	13.500.000	0,00	0	13.500.000	0,00	0,00			
		Jumlah Dokumen Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
20952107	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	2	176.311.000	0	1.206.227.831	2	487.857.100	310.674.300	0	27.000.000	0	90.137.244	0	117.137.244	0	37,70	0	1.323.365.125	0	742,17		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024
		Jumlah sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	sampel	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20952109	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	130.801.200	0	51.700.000	1	85.400.000	33.078.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0	51.700.000	0	39,53		Target Tahun 2023 dan Berubah di Tahun 2024	
		Jumlah kelompok Pembinaan kelembagaan Pangan segar yang terampil	Kelompok	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
															Rata-rata capaian		27,00	25,58						
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Faktor Penghambat	- Belum terbentuknya kelembagaan kelompok																						
	Faktor pendorong	- Terbentuknya kerjasama dengan bidang keamanan pangan tingkat propinsi untuk pembinaan kepada Pelaku usaha baik komoditi beras maupun rempah, dan adanya kerjasama dengan penyuluh pertanian di tingkat KWT/KT. - Tersedianya hasil produksi pertanian dan KWT yang bersertifikat yang memberikan jaminan keamanan pangan. - Tersedianya hasil produksi PSAT yang aman beredar di pasaran, baik pasar tradisional maupun ritel - Adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan keamanan pangan PSAT berupa rapid test dan Mobil Lab Ammol - Dukungan dari skpd lain seperti penyuluh pertanian untuk melakukan Pembentukan kelompok usaha, pembinaan produksi, peningkatan kualitas, maupun pemasaran ditingkat KWT maupun KT																						
	Tindak Lanjut	- Melakukan pembinaan ke pelaku usaha beras dan rempah terkait penerbitan nomor registrasi PDUK, serta pendampingan ditingkat KWT/KT terkait SOP dalam proses penerbitan Sertifikasi Prima. - Penambahan tenaga SDM yang profesional (bersertifikasi) dalam pengawasan keamanan PSAT. - Melakukan pembinaan atau pelatihan peningkatan kualitas melalui program skill training pada aspek manajemen mutu dan pasar.																						

Sumber Data : Form E. 81, Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Rata-rata Capaian Realisasi Serapan Anggaran dari seluruh program pada Dinas Ketahanan Pangan mencapai 15.94% dengan predikat Sangat Rendah. Pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 disimpulkan dari 5 (Lima) program, dana yang dianggarkan berjumlah Rp.24.555.363.432,- pada APBD Pokok, anggaran yang terealisasi hingga 30 Juni berjumlah Rp.3.914.072.221,- dan anggaran yang tersisa berjumlah Rp. 21.355.444.889,-.

A. Program Penunjang/Pendukung

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Realisasi Indikator Kinerja sampai saat ini sebagai berikut:

- Presentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas : 40%
- Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah : 36.87%
- Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik : 29.70%

Dengan anggaran sebesar Rp. 8.695.297.632,-. Adapun realisasi Keuangan Sampai 30 Juni 2024 adalah 32.04% atau sebesar Rp 2.785.968.095,- dan untuk realisasi fisik 34,50 % .

Faktor Penghambat : Pencairan Kegiatan yang bersifat rutin belum on date mengikuti keluarnya SPD dari BPKAD

Faktor Pendorong : dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang sifatnya rutin dikerjakan setiap bulannya.

Tindak Lanjut :

- Diperlukan evaluasi tiap bulannya terhadap penyerapan anggaran
- Dalam penyerapan anggaran sebaiknya menyesuaikan dengan alur kas

B. Program Utama

1). Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Indikator kinerja program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan pada saat perubahan yaitu Persentase Ketersediaan Pangan Utama, Realisasi Indikator Kinerja sampai saat ini 15% dengan anggaran sebesar Rp. 52.000.000 ,-, adapun realisasi Keuangan Sampai 30 Juni adalah 71.06%% sebesar Rp. 36,950,920 ,- dan untuk realisasi fisik 75 %.

Faktor Penghambat :Masih dalam tahap pengumpulan data Ketersediaan Pangan Utama

Faktor pendorong	: Dukungan data Ketersediaan Pangan Utama dari penggilingan beras yang ada di Wilayah Kota Makassar
Tindak Lanjut	: Melakukan Koordinasi ke Provinsi Sulawesi Selatan dan ke Bapanas terkait dengan Ketersediaan Pangan Utama

2). Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator kinerja program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada saat perubahan yaitu Lorong Garden dan Lorong Wisata, Skill Trining Gratis, Ketersediaan energi dan protein perkapita, Skor PPH. Realisasi Indikator Kinerja sampai saat ini sebagai berikut :

- Lorong Garden dan Lorong Wisata : 184 Lorong
- Skill Training Gratis : 112 Orang
- Energi : 2019 kkal/kap/tahun
- Protein : 54,67 gr/kap/tahun
- Skor PPH : 0

dengan anggaran sebesar Rp. 14.884.105.500,-. Adapun realisasi Keuangan Sampai 30 Juni 2024 adalah 5.63% sebesar Rp.837,800,362 ,- dan untuk realisasi fisik 38.67%.

Faktor Penghambat :

- a. Data dari beberapa SKPD secara tehknis masih dalam proses rekapan;
- b. Belum ada surat balasan dari BULOG terkait HET;
- c. Beberapa kegiatan pengambilan data harus disesuaikan alur kas, sehingga menghambat terlaksananya kegiatan,
- d. Masih kurangnya sarana dan Prasarana yaitu berupa kendaraan yang mengangkut bahan pangan ke lokasi GPM (Gerakan Pangan Murah)
- e. Belum terpenuhinya jumlah usulan kelompok calon penerima bantuan dari Kelurahan.

Faktor pendorong :

- a. Dukungan data dari beberapa PD termasuk Tim Satgas Pangan, Keterlibatan tenaga penyuluh, laskar pelangi dan ASN lingkup Dinas Ketahanan Pangan dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Dukungan dari pihak BULOG dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah;
- c. Sub kegiatan ini merupakan kegiatan pengambilan data konsumsi harian masyarakat, faktor pendorong nya data Konsumsi harian Masyarakat sudah didukung Data SUSENAS yang nanti disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Dukungan dari pihak terkait seperti PD pasar dan beberapa distributor yang memudahkan dalam pengambilan data stok, pasokan dan harga pangan.

- e. Sub kegiatan ini meliputi lorong wisata dan Pelatihan Teknis Penganekaragaman Pangan Berbahan Baku Lokal. Faktor pendorongnya adalah (1) kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan berdasarkan visi misi Walikota Makassar tahun 2021 - 2026 tentang peningkatan lorong garden dan pembentukan 5.000 lorong wisata, (2) Kontribusi pihak ketiga dari universitas, Bank Indonesia dan rekanan yang tinggi demi kemajuan pangan di Kota Makassar dan (3) Adanya kesadaran masyarakat selama masa pasca pandemi untuk mendapatkan hasil pangan dengan pemanfaatan lahan perkarangan sendiri.

Tindak Lanjut :

- Memberikan kemudahan dalam penyediaan pangan kepada masyarakat untuk pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan;
- Koordinasi yang baik dan intensif kepada Bulog Makassar dilakukan agar pengadaan cadangan pangan pemerintah dapat terlaksana guna mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga;
- Saat ini sedang berjalan kegiatan monitoring dan verifikasi usulan kelompok lorong wisata tahun anggaran 2024 dan koordinasi bersama penyuluh dan pihak kelurahan terkait pemenuhan usulan lorong wisata tahun Anggaran 2025.

3). Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator kinerja program Penanganan Kerawanan Pangan pada saat perubahan yaitu Presentase penanganan daerah rawan pangan. dengan anggaran sebesar Rp. 413.233.000,- Adapun realisasi Keuangan Sampai 30 Juni 2024 adalah 29.70% sebesar Rp. 122,714,600 ,- dan untuk realisasi fisik 40.0%

Faktor Penghambat :

- Data dari skpd terkait masih bulan Desember tahun 2023. Data tersebut diperoleh dari hasil olah data dari SKPD penyedia data;
- Belum adanya intruksi dari pemerintah daerah untuk penyaluran Cadangan Pangan dan penyaluran berdasarkan perwali cadangan pangan. Kegiatan ini akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan
- Data dari skpd terkait masih bulan Desember tahun 2023. Data tersebut diperoleh dari hasil olah data dari Dinas Kesehatan.

Faktor pendorong :

- Dukungan kesiapan data dari beberapa instansi terkait mengenai data indikator penyusunan FSVA dan data indikator penyusunan SKPG;
- Bulog Sub Divre Makassar mendukung dalam pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
- Dukungan kesiapan data dari skpd terkait mengenai data indikator penyusunan skpg 2024.

Tindak Lanjut :

- a. Koordinasi dengan skpd terkait terhadap hasil analisis dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk intervensi daerah rawan pangan;
- b. Koordinasi dengan Bulog selaku penyedia pangan untuk pelaksanaan penyaluran cadangan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan di masyarakat;
- c. Konsultasi dengan SKPD terkait dalam penyediaan data terkait penanganan daerah rawan pangan.

4). Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator kinerja program Pengawasan Keamanan Pangan pada saat perubahan yaitu Presentase pengawasan keamanan pangan. Realisasi Indikator Kinerja sampai saat ini 28,3% dengan anggaran sebesar Rp. 510.727.300,- adapun realisasi Keuangan Sampai 30 Juni 2024 adalah 25.58% sebesar Rp.130,637,244,- dan untuk realisasi fisik 30% . Ini didapatkan dari hasil pengujian sampel di pasar tradisional dan modern, didapatkan hasil aman.

Faktor Penghambat :

- a. Dalam Proses Kelengkapan Administrasi
- b. Belum terbentuknya kelembagaan kelompok

Faktor pendorong :

- a.
 - Terbentuknya kerjasama dengan bidang keamanan pangan tingkat propinsi untuk pembinaan kepada Pelaku usaha baik komoditi beras maupun rempah dan adanya kerjasama dengan penyuluh pertanian di tingkat KWT/KT.
 - Terdampaknya hasil produksi pertanian dari KWT yang bersertifikat yang memberikan jaminan keamanan pangan.
- b.
 - Terdapatnya hasil produksi PSAT yang aman beredar di pasaran, baik pasar tradisional maupun ritel
 - Adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan keamanan pangan PSAT berupa rapid test dan Mobil Lab Ammoli
- c. Dukungan dari skpd lain seperti penyuluh pertanian untuk melakukan Pembentukan kelompok usaha, pembinaan produksi, peningkatan kualitas, maupun pemasaran ditingkat KWT maupun KT

Tindak Lanjut :

- a. Melakukan pembinaan ke pelaku usaha beras dan rempah terkait penerbitan nomor registrasi PDUK serta pendampingan ditingkat KWT/KT terkait SOP dalam proses penerbitan Sertifikasi Prima.
- b. Penambahan tenaga SDM yang profesional (bersertifikasi) dalam pengawasan keamanan PSAT.

- c. Melakukan pembinaan atau pelatihan peningkatan kualitas melalui program skill training pada aspek manajemen mutu dan pasar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar diarahkan fokus pada kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan Daerah .

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM)/Standar Nasional untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU)/Muatan Lokal, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan bidang urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, meliputi aspek penilaian pada tataran pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat didalamnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel TC. 30** berikut :

Tabel 2.2. Form T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-		90	90	90	90	100	49,05	90	90	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
2	Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	-		100	100	100	100	90	32,64	100	100	Penyusunan dokumen perencanaan berbasis evidence
3	Presentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	-		90	90	90	90	90	29,0	90	90	Peningkatan Kualitas SDM
5	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	90 %		90%	91%	92%	93%	-	-	90%	91%	Koefisiensi Angka Ketersediaan Pangan Utama
6	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	2.400 kkal/kapita /hr dan 63 kkal/kapita /hari		Energi: 2.600 Protein: 126	Energi: 2.600 Protein: 126	Energi: 2.700 Protein: 127	Energi: 2.700 Protein: 128	Energi: 2.716 Protein: 73,71	Energi: 2441 Protein: 66,92	Energi: 2.600 Protein: 126	Energi: 2.600 Protein: 126	Hasil analisis NBM yang menggambarkan Ketersediaan energi dan protein untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Kota Makassar

7	Jumlah Skill Training Gratis	-		200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	-	200 orang	200 orang	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat
8	Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	-		500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	394 Lorong Garden dan Lorong Wisata	200 Lorong Garden dan Lorong Wisata	500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi
9	Skor PPH	100		80	82	85	88	83,9	-	80	82	Analisis skor mengalami penurunan diakibatkan variasi konsumsi masyarakat
10	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan			23,52%	17,64%	17,64%	11,76%	23,52%	-	23,52%	17,64%	Analisis menurun dengan harapan penduduk rawan pangan semakin berkurang
11	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	100		90%	92%	94%	96%	100%	47,50%	90%	92%	Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan Jumlah kelompok usaha yang teregistrasi PSAT

Sumber Data : Renstra, Tahun 2021-2026

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar di masa mendatang.

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas, masih kurangnya pelatihan-pelatihan dan rendahnya disiplin khususnya PNS teknis sehingga kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar belum maksimal sesuai dengan program kerja yang direncanakan;
2. Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat miskin belum maksimal, adanya temuan pelanggaran standar keamanan pangan, belum tersedianya sarana prasarana keamanan pangan dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam panganekaragaman pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman;
4. Rendahnya persentase kelompok tani yang menerapkan sistem informasi;
5. Masih adanya kasus stunting yang ada di Kota Makassar.;
6. Masih belum terjaminnya keamanan pangan yang beredar di pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Makassar.
7. Masih belum stabilnya harga pangan yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern.
8. Terbatasnya SDM Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk memeriksa keamanan pangan;
9. Belum tersedianya sistem informasi pangan yang baik untuk peningkatan kemandirian pangan.

Permasalahan di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu : Penanganan daerah rawan pangan dan pencapaian peningkatan lorong garden menjadi 5000 lorong wisata agar tercipta skor pola pangan harapan yang baik, serta Gerakan Masyarakat Perkuatan Imunitas kesehatan dan Ekonomi yang tetap memperhatikan pangan yang aman, bergizi, sehat dan seimbang serta terjangkau oleh masyarakat luas. Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar telah menyiapkan 5 (lima) program

utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan SDM dengan peningkatan sumber daya yang ada, agar kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar menjadi maksimal.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tercukupinya ketersediaan pangan utama yang ada di Kota Makassar;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, merupakan program untuk :
 - a. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok dan lainnya di Kota Makassar;
 - b. Menyediakan cadangan pangan pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan di Kota Makassar;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya panganekaragaman pangan sehingga mampu menjadi keluarga yang mandiri pangan;
 - d. Meningkatkan kesadaran kelompok wanita tani agar menerapkan sistem informasi dalam berbagai aspek dalam kelompoknya.
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan, merupakan program untuk mengantisipasi daerah rawan pangan yang ditangani agar lebih efektif dan efisien yang didukung oleh adanya Peta FSVA untuk mengklusterisasi daerah sangat rawan pangan, rawan pangan, agak rawan pangan.
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan, merupakan program untuk membantu Dinas Ketahanan Pangan dalam mengawasi keamanan pangan yang beredar, baik di pasar tradisional maupun pasar modern berupa pangan segar asal tumbuhan (PSAT), sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar memperhatikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi.

2.4. Review terhadap Rencana Akhir Perubahan RKPD

Sejalan dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2021-2026, maka Dinas Ketahanan Pangan melakukan penyesuaian program, kegiatan dan Sub kegiatan sesuai dengan visi misi walikota ke dalam dokumen perencanaan perubahan.

Pada saat yang bersamaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar juga mempersiapkan Rencana Akhir Renstra tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Akhir RPJMD Pemerintah Kota Makassar tahun 2022-2026, yang dijabarkan di dalam rencana kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan tahunan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan di tingkat Dinas Ketahanan Pangan jika dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) telah mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Makassar.

Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar telah melaksanakan tupoksi sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024. Sejalan dengan masa transisi dari RPJMD tahun 2014-

2019 ke tahun 2021-2026 tersebut, untuk melakukan review terhadap Rencana Akhir RKPD tahunan yang berpedoman pada RPJMD Kota Makassar dan Rencana Akhir Renja-Dinas Ketahanan Pangan sesuai rancangan Renstra-Dinas Ketahanan Pangan. Secara umum Rencana Akhir RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, dimana ada penambahan kegiatan pada Renja 2024 Perubahan.

Untuk memperjelas review Rencana Akhir RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan terhadap program, kegiatan, volume dan anggaran yang sama dapat dilihat pada **Tabel 2.3 Form T-C.31**.

Pada saat yang bersamaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar juga mempersiapkan Rencana Akhir Renstra tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Akhir RPJMD Pemerintah Kota Makassar tahun 2022-2026, yang dijabarkan di dalam rencana kerja (Renja)–Dinas Ketahanan Pangan tahunan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan di tingkat Dinas Ketahanan Pangan jika dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) telah mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Makassar. Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Renja–Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024.

Sejalan dengan masa transisi dari RPJMD tahun 2014-2019 ke tahun 2021-2026 tersebut, untuk melakukan review terhadap Rencana Akhir RKPD tahunan yang berpedoman pada RPJMD Kota Makassar dan Rencana Akhir Renja-Dinas Ketahanan Pangan sesuai rancangan Renstra-Dinas Ketahanan Pangan. Secara umum Rencana Akhir RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, dimana ada penambahan kegiatan pada Renja 2024 Perubahan.

Untuk memperjelas review Rencana Akhir RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan terhadap program, kegiatan, volume dan anggaran yang sama dapat dilihat pada tabel review Terhadap Rencana Akhir RKPD tahun 2024 berikut :

TABEL 2.4 Form T-C.31
REVIEW TERHADAP RENCANA AKHIR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

NO	RENCANA AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				15.866.712.670						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	90 % 100 %	7,414,787,270	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	0	8,604,706,192	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	12 Dokumen	163.788.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	12 Dokumen	168,900,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	102.273.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	142,900,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA- PD	1 Dokumen	10.209.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA- PD	1 Dokumen	5,000,000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PD	1 Dokumen	9.954.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PD	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA PD	1 Dokumen	8.795.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA- PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA PD	1 Dokumen	5,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA PD	1 Dokumen	10.155.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA PD	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Kota Makassar	Tersedianya Dokumen	1 Laporan	22.400.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Kota Makassar	Tersedianya Dokumen	1 Laporan	6,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Persentase Pelaksanaan Keuangan PD	100 %	5.409.590.370	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Persentase Pelaksanaan Keuangan PD	100 %	4,912,651,200	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.935.059.970	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	5,097,501,092	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	268.080,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	278,240,000	Honorarium PPTK masih kurang 1 bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	188.645.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	180,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Kota Makassar	Tersedianya Laporan Akhir Tahun PD	1 Laporan	14,400,000	
	Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dsn Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8.878.000	Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dsn Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	16,200,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	17,700,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.926.700	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12,300,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Persentase penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	495,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Persentase penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	452,721,400	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	67 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pendisiplinan ASN	67 Paket	44,721,400	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	96 Orang	495.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	96 Orang	408,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Persentase Tersedianya Administrasi Umum PD	100 %	793.259.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Persentase Tersedianya Administrasi Umum PD	100 %	1,254,783,400	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	149.474.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	222,841,800	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	0	

Penyediaan Logistik bahan kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	84.663.000	Penyediaan Logistik bahan kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	231,681,600	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.867.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13,920,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	266.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	476,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	7,440,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	287.255.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	310,340,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Persentase Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Persentase Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	457,594,400	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	33 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	33 Unit	457,594,400	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	389.052.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	387,371,300	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	279,367,200	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58,200,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	330.852.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49,804,100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Persentase pemeliharaan BMD urusan pemerintahan daerah	100 %	164.096.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Persentase pemeliharaan BMD urusan pemerintahan daerah	100 %	268,994,600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	31.916.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44,930,000	Kurang Pemeliharaan Mobil Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	74.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	146,547,500	Kurang Pemeliharaan 3 Mobil Dinas Operasional dan 6 Motor Dinas Operasional
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang Dipelihara	18 Unit	57.190.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang Dipelihara	18 Unit	51,190,000	

	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Makassar	Ketersediaan Pangan Utama	92%	48.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Makassar	Ketersediaan Pangan Utama	92%	72,900,000	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan	15 Kecamatan	48.000.000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan	15 Kecamatan	72,900,000	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Unit	48.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	72.900.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	0,00	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kota Makassar	Jumlah Training Skill Gratis Skor PPH Ketersediaan Protein Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	200 Orang 85 Poin 127 gr/kap/tahun 500 Lorong	7.611.265.700	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kota Makassar	Jumlah Training Skill Gratis Skor PPH Ketersediaan Protein Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	200 Orang 85 Poin 127 gr/kap/tahun 500 Lorong	339.684.000	

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Ketersediaan Energi dan Protein serta Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	455.817.500	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Ketersediaan Energi dan Protein serta Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	713.814.200	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	132.934.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	144.869.200	
Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan	Kota Makassar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	38 Laporan	158.777.200	Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan	Kota Makassar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	38 Laporan	243.345.000	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Makassar	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	164.105.400	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Makassar	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	325.600.000	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah	25 Ton	324.400.800	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah	25 Ton	325.800.000	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	22 Ton	324.400.800	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah cadangan pangan beras	22 Ton	325.800.000	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Makassar	Jumlah Lokasi Analisa Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	1 Kota Makassar	6.831.047.400	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Makassar	Jumlah Lokasi Analisa Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	1 Kota Makassar	15.739.349.300	

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	15 Kecamatan	54.300.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Jumlah Lokasi analisa ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	15 Kecamatan	112.460.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Makassar	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15 Laporan	6.429.797.400	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Makassar	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15 Laporan	15.284.989.300	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	15 Laporan	346.950.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	15 Laporan	341.900.000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Makassar	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	11.76 %	354.833.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Makassar	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	11.76 %	516.354.400	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Makassar	Tersedianya Data dan Informasi tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan	1 Laporan	138.699.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Makassar	Tersedianya data informasi tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan	1 Laporan	202.290.000	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Makassar	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	138.699.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Makassar	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	202.290.000	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Tersedianya Laporan Penganan Daerah Rawan Pangan	1 Laporan	216.134.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Tersedianya Laporan Penganan Daerah Rawan Pangan	1 Laporan	314.064.400	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	59.367.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Terjalinnnya kerjasama lintas sektor untuk penanganan kerawanan pangan	1 Laporan	238.200.000	

	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	156,766,400	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.864.400	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Makassar	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	94 %	504.077.300	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Makassar	Tersedianya Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dan bermutu	94 %	859.250.300	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Tersedianya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Laporan	437.826.700	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Tersedianya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Laporan	859.250.300	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Makassar	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6 Dokuman	33.078.900	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6 Dokuman	85.400.000	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	122.673.500	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah sertifikat uji mutu yang dikeluarkan	2 Dokumen	285.993.200	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	240 Sampel	282.074.300	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	240 Sampel	487.857.100	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dasar usulan Program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan program prioritas dan non prioritas dan dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang mendukung pementapan ketahanan pangan dalam Renstra 2021-2026 sehingga mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat dan mampu menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat di tingkat rumah tangga.

Berdasarkan usulan yang masuk, maka diselenggarakanlah Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Ruang Sipakalebbi dengan menghadirkan stakeholder terkait, LPM, pihak kecamatan pengusul serta Anggota DPRD Kota Makassar, selanjutnya dilaksanakan Forum Perangkat Daerah tingkat Kota Makassar dalam rangka penyamaan persepsi dan penentuan alokasi anggaran dan penempatan usulan yang dianggap tidak tepat sasaran, Adapun usulan yang masuk pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 (T.C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kantor Lurah Paropo, Jl. Toddopuli Raya No. 100 RT.01 RW.09, Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	500 lorong garden dan Lorong wisata	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang tanaman hias/hidponik dan apabila dipahami akan menjadi nilai tersendiri untuk kebutuhan Rumah Tangga 20 Orang Rp. 18.320.000	Pelatihan pengembangan tanaman hias / tanaman hidroponik (Achiruddin Achmad, S.STP.,M.M) (MUSRENBANG) Pengalihan Ke DP2
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Baruga BTN Bung Permai, RT.06/RW.07 , Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya	500 lorong garden dan Lorong wisata	Rendahnya pemahaman Pokdakan tentang Budidaya hidroponik maka perlu diadakan Pelatihan Tanaman Hidroponik pd 30 Anggota Pokdakan Tambasa, I & II estimasi biaya Rp. 18.320.000	Pelatihan pengembangan tanaman hias / tanaman hidroponik (ALAM SYAH, S.AB) (MUSRENBANG) Pengalihan Ke DP2
3	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Wilayah kelurahan Ujung Pandang Baru, Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru	500 lorong garden dan Lorong wisata	Pengadaan bantuan bibit tanaman di wilayah RW : 01,02,03,04,05 dengan volume 104 sachet dengan anggaran Rp. 4.680.000	Bantuan Bibit tanaman Pangan di Lorong (IRMA SOFYAN RONNY SE., MM) (MUSRENBANG) Terakomodir

4	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kel. Bulogading (RW .01, RW 02, RW.03 DAN rw 04), Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	500 lorong garden dan Lorong wisata	Pelatihan pengembangan tanaman hias / tanaman hidroponik di Perlukan untuk mengembangkan Keterampilan Masyarakat dan Upaya Pemanfaatan Lahan sebagai usaha Pengembangan Tanaman sayuran atau Tanaman Hias dengan Volume Kegiatan : 30 Orang Estimasi Anggaran RP. 18.320.000,-	Pelatihan pengembangan tanaman hias / tanaman hidroponik (ABDUL LATIF, SH) (MUSRENBANG) Pengalihan Ke DP2
5.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jl. Gontang Barat RW 02/RT 03 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kota Makassar	500 lorong garden dan Lorong wisata	Warga meminta Pemerintah Kota agar saling membantu dalam memfasilitasi kelompok tani sekitar agar bisa meningkatkan penghasilan para kelompok tani sekitar	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (BUDI HASTUTI) (POKIR) Terakomodir
6.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jl. Rappocini Raya Lr.9 (Longwis Chaves Benteng) RT.004 / RW.005 Kel. Buakana Kec. Rappocini, Kota Makassar	500 lorong garden dan Lorong wisata	Warga mengharapkan bantuan UMKM (Bantuan gerobak)	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (HJ. ANDI SUHADA SAPPAILE) Pengalihan Ke Dinas Koperasi

Sumber Data : Usulan Musrenbang dan Pokir 2024

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pada Dinas Ketahanan Pangan secara keseluruhan mempunyai 6 (enam) usulan diantaranya 4 (empat) usulan Musrenbang dan 2 (dua) usulan Pokir. Dari hasil Forum Perangkat Daerah Lingkup Kota Makassar dihasilkan pemetaan usulan kepada masing-masing pemangku kepentingan, dimana pada usulan Musrenbang terdapat 3 (tiga) usulan yang dialihkan ke Dinas Perikanan dan Pertanian karena berkaitan dengan Tupoksi DP2 terkait bantuan tanaman hias dan 1 (satu) usulan POKIR yang dialihkan ke Dinas Koperasi karena berkaitan dengan bantuan gerobak pada UMKM, mengingat jenis usulan di atas yang kurang tepat dalam penempatan ke Perangkat Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Rencana kerja dan pendanaan Perubahan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif perubahan yang dirancang untuk menyesuaikan dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada tahun 2021 dalam upaya pemenuhan Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Di tahun 2024 yang tertuang dalam rencana kerja pokok, terdapat Evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2024 Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar sampai Triwulan II, dimana telah melaksanakan 5 (Lima) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan, yang terdiri atas 1 (Satu) program penunjang/pendukung, 6 (enam) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dan 4 (empat) program utama, 7 (Tujuh) kegiatan, 14 (empat belas) sub kegiatan.

Dinas Ketahanan Pangan Menyusun Rencana Kerja Perubahan yang tertuang dalam Matriks Rencana Kerja Perubahan yang mencakup Kode Rekening, Urusan bidang, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, capain serta prakiraan maju yang dilaksanakan oleh DKP, dengan rincian tersaji pada Tabel T-C. 19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2024 Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 3.1. Matriks Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelum						Sesudah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2	9	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas			Kota Makassa r	90 %	90 %						Pendapat an Asli Daerah (PAD)	90 %	7.957.694.625		
							Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah			Kota Makassa r	100 %	100 %							Pendapat an Asli Daerah (PAD)		100 %	
													8.695.297. 632	7.414.787. 270								

							Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			Kota Makassar	90 %	90 %						Pendapat an Asli Daerah (PAD)			90 %		
2	09	01	2	01			Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar				12 Dokumen	14 Dokumen	217.170.100	163.788.500,00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			6 Dokumen	320.621.000
2	09	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Makassar			2 Dokumen	2 Dokumen			147.273.500	102.273.500	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			2 Dokumen	159.520.000
2	09	01	2	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Makassar			2 Dokumen	2 Dokumen			12.091.400	10.209.900	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			2 Dokumen	9.984.000

2	09	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar			2 Dokum en	2 Dokume n			12.298.50 0	9.954.000, 00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Dok ume n	9.161.000
2	09	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar			2 Dokum en	2 Dokume n			10.573.30 0	8.795.500, 00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		2 Dok ume n	9.595.000

2	09	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar				2 Dokum en	2 Dokume n			10.583.30 0	10.155.50 0,00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Dok ume n	9.005.000
2	09	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar				4 Dokum en	4 Dokume n			24.350.10 0	22.400.10 0,00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Dok ume n	22.141.000

2	09	01	2	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Makassar				0	0			0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5 Dokumen	101.215.000
2	09	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Presentase Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar						100 %	100 %	6,285,061,132	5,409.590.370,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100 %	6.138.280.000
2	09	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Makassar				33 Orang/Bulan				5.810.530.732	4,935.059.970,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39 orang	5.764.049.000
2	09	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Makassar				1 Dokumen	1 Dokumen			268.080.000	268.080,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Honorarium PPTK masih kurang 1 bulan		100 %	134.640.000

2	09	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar			12 Dokumen	12 Dokumen			188.645.700	188.645.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12 Bulan	168.000.000
2	09	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar			0	0			0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Laporan	17.504.000
2	09	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Makassar			6 Dokumen	6 Dokumen			8.878.000	8.878.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Laporan	18.329.000

2	09	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar			0	0			0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Dokumen	23.729.000
2	09	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar			2 Dokumen	2 Dokumen			8.926.700	8.926.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Dokumen	12.029.000

2	09	01	2	05		Administrasi Kepengawain Perangkat Daerah		Persentase Tersedian ya Administ rasi Kepengawai an Perangkat Daerah	Kota Makassa r					100 %	100 %	495,000,0 00	495,000,0 00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)		100 %	415.500.000
2	09	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kota Makassar			0	0			0	0	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		65 Oran g	91.500.000
2	09	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kota Makassar			100 Orang	100			495.000.0 00	495.000.0 00,00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		10 Oran g	324.000.000

2	09	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	Kota Makassar					100 %	100 %	1,144,917,500	793.259.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100 %	381.533.825
2	09	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kota Makassar			4 Paket	4 Paket			200.047.100	149.474.100,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12 Bulan	59.993.825
2	09	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Kota Makassar			0	0			0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Unit	10.000.000
2	09	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kota Makassar			2 Paket	2 Paket			153.663.000	84.663.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12 Bulan	21.600.000

2	09	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Makassar			1 Paket	1 Paket			5.867.400,00	5.867.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100 %	13.940.000
2	09	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Makassar			42 Laporan	42 Laporan			496.000.000	266.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12 Bulan	173.000.000
2	09	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Makassar			4 Dokumen	4 Dokumen			289.340.000	287.255.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12 Kali	103.000.000
2	09	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya BMD Penunjang Urusan PD			Kota Makassar	0	0					0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100 %	137.999.000

2	09	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	0	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Unit	137.999.000
2	09	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	100 %	100 %	389,052,900	389.052.900,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 %	276.104.800
2	09	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	0	0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	219.389.800
2	09	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	1 Laporan	1 Laporan	58.200.000	58.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Bulan	12.000.000

2	09	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar			0	0			0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31 Unit	31.500.000
2	09	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar			1 Laporan	1 Laporan			330.852.900	330.852.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan	13.215.000
2	09	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar					100 %	100 %	164,096,000	164.096.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Masih membutuhkan anggaran pemeliharaan	100 %	287.656.000

2	09	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar			1 Unit	1 Unit			31.916.000	31.916.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	89.284.000
2	09	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar			12 Unit				74.990.000	74.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Unit	187.392.000
2	09	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar			19 Unit	87 Unit			57.190.000	57.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 kali	10.980.000

2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama			Kota Makassar	92 %	92 %				52,000.00 0	48.000.00 0	Pendapat an Asli Daerah (PAD)		94%	200.570.000
2	09	02	2	01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Meningkat nya pengetahu an masyaraka t tentang pentingny a kemandiri an pangan	Kota Makassar				15 Kecam atan	15 Kecam atan	52.000.00 0	48.000.00 0	Pendapat an Asli Daerah (PAD)		15 Kec ama tan	200.570.000
2	09	02	2	01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia			Kota Makassar			1 Unit	1 Unit		52.000.00 0	48.000.00 0	Pendapata n Asli Daerah (PAD)		1 Unit	0

2	09	02	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Makassar			0	0		0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	200.570.000
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	Kota Makassar	500 Lorong	500 Lorong				14,884,105,500	7.611.265.700,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	500 Lorong	13.700.855.637
							Jumlah Skill Training Gratis	Kota Makassar	200 Orang	200 Orang						Pendapatan Asli Daerah (PAD)	200 Orang	
							Ketersediaan Energi	Kota Makassar	2700 kkal/kap/tahun	2700 kkal/kap/tahun						Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2700 kkal/kap/tahun	
							Ketersediaan Protein	Kota Makassar	127 gr/kap/tahun	127 gr/kap/tahun						Pendapatan Asli Daerah (PAD)	127 gr/kap/tahun	
							Skor PPH	Kota Makassar	85 Poin	85 Poin						Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85 Poin	

2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			Jumlah Laporan Ketersediaan Energi dan Protein serta Stok,Pasokan dan Harga Pangan	Kota Makassar					1 Dokumen	1 Dokumen	581,217,500	455.817.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Dokumen	587.387.000	
2	09	03	2	01	03	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Kota Makassar		12 Laporan	12 Laporan					171,634,900	132.934.900	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			1 Laporan	234.587.000

2	09	03	2	01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kota Makassar	16 Laporan	16 Laporan	189,477,200	158.777.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38 Laporan	0
2	09	03	2	01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	220,105,400	164.105.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	352.800.000
2	09	03	2	02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah	Kota Makassar	93 Ton	93 Ton	327,200,800	324.400.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 ton	90.000.000
2	09	03	2	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	Kota Makassar	20 Ton	20 Ton	327,200,800	324.400.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 ton	90.000.000

2	09	03	2	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			Jumlah Lokasi Analisa Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Kota Makassar					1 Kota	1 Kota	13,975,687,200	6.831.047.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Kota Makassar	13.023.468.637
2	09	03	2	04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			96,300,000	54.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15 Dokumen	106.878.214
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Kota Makassar			23 Laporan	23 Laporan			13,532,437,200	6.429.797.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15 Laporan	12.763.622.569

2	09	03	2	04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kota Makassar			6 Laporan	6 Laporan		346,950,000	346.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Laporan	152.967.854
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		Kota Makassar	11,76	11,76				413,233,000	354.833.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.76 %	414.532.400
2	09	04	2	01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Tersedianya Data dan Informasi tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan	Kota Makassar			1 Laporan	1 Laporan		181,099,000	138.699.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	252.482.400
2	09	04	2	01	01	Penyusunan. Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen		181,099,000	138.699.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	252.482.400

2	09	04	2	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Tersedianya Laporan Penangan Daerah Rawan Pangan	Kota Makassar					1 Laporan	1 Lapora n	232,134,00 0	216.134.00 0,00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			1 Lapo ran	162.050.000
2	09	04	2	02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan,Peng elolaan,dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kota Makassar			1 Dokume n	1 Dokumen			75,367,600	59.367.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Doku men	73.637.000
2	09	04	2	02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			Kota Makassar			2 Lapora n	2 Laporan			156,766,4 00	156,766,4 00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			1 Lapo ran	88.413.000

2	09	05					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan			Kota Makassar	94 %	94 %					510,727,300	504.077.300	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			94 %	345.573.700
2	09	05	2	01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			Tersedian ya Pelaksana an Pengawasa n Keamanan Pangan Segar	Kota Makassar					1 Lapora n	1 Lapora n	510,727,300	437.826.700,00	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			1 Lap oran	345.573.700
2	09	05	2	01	04		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Makassar			1 Dokume n	1 Dokumen			166,974,100	122.673.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Doku men	
								Jumlah Dokumen Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Makassar			1 Dokume n	1 Dokumen					Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Doku men	

2	09	05	2	01	07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan kabupaten/kota		Kota Makassar			2 Dokumen	2 Dokumen			310,674,300	282.074.300,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			240 Sampel	193.772.500
2	09	05	2	01	09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			33,078,900	33.078.900,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6 Dokumen	151.801.200

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 disimpulkan dari 5 (Lima) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan, yang terdiri atas 1 (Satu) program Penunjang/Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 6 (enam) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dan 4 (empat) program utama, 7 (tujuh) kegiatan, 14 (empat belas) sub kegiatan.

Program kerja yang terjabar di dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar merupakan tahapan operasionalisasi pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Makassar yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan terjadi perubahan dikarenakan penyesuaian dengan kegiatan berjalan.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dalam Musrenbang. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan, masyarakat dan stakeholder lainnya sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja dalam lingkup Dinas, masyarakat dan stakeholder lainnya berkewajiban melaksanakan program - program yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas untuk menyusun kebijakan publik, baik yang berupa regulasi maupun pelayanan publik, dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran PD (RKA-PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA-PD) Tahun 2024, dengan ketentuan :
 - a. Uraian penggunaan pagu indikatif Tahun 2024 merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas agenda kerja pembangunan daerah.
 - b. Uraian rencana penggunaan pagu indikatif Tahun 2024 merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas PD sesuai tupoksinya.
3. Pelaksanaan rencana tindak lanjut yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 ini wajib mengikuti prinsip - prinsip pengarusutamaan yaitu : pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender.
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang undangan. Berkaitan dengan pendanaan, masyarakat luas dan stakeholder lainnya dapat berperan serta dalam pelaksanaan program - program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan

perundang=undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program - program pembangunan.

Dengan demikian dirumuskan beberapa catatan penting untuk mencapai Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program kerja ini sangat bergantung kepada komitmen pimpinan dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang akan tertuang dalam Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, setiap unit terkait (Sekretariat dan Bidang) wajib menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik kerangka regulasi maupun pelayanan publik, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan baik antar program, antara kegiatan dalam satu program, maupun kegiatan antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing unit kerja.

Pada akhir tahun 2024, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA, RKA PD, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD di Kota dan peraturan-peraturan lainnya.

Dinas Ketahanan Pangan berkomitmen untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan mewajibkan kepada seluruh penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan pemantauan, melakukan Tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas akan menyampaikan kepada Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini diharapkan sesuai dengan rencana awal sehingga dapat direalisasikan dengan pencapaian kinerja yang memuaskan.

Makassar, 6 Agustus 2024

Plt.Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kota Makassar,



Dr. ALAMSYAH SAHABUDDIN, S.STP,MSI
 Pangkat/ Gol : Pembina Tk.I / IV.b
 NIP : 19820930 200012 1 001



LAMPIRAN



Lampiran 1 . Form T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2024 Kota Makassar

TABEL T-C.19 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2024 KOTA MAKASSAR																					
NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKA TOR KINERJ A PROGR AM (OUTCO ME) / KEGIAT AN (OUTPU T)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	KETER ANGAN
						Ki ne rj a	Angga ran	Kin erja	Anggara n	Kin erja	Anggaran	Kine rja	Anggaran	Kine rja	Angga ran	Kinerj a	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7 X 100%		10 = 6+8		11= 10/5 x 100%		11	12
	2			URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR																	
	2	0 9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
	2	0 9	0 1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentas e sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	9,507, 287,00 0	87,6	6.388.62 7.218	90	7.597.450.00 3	99,33	6.560.906.16 7	110,3 6	89.36	186,93	12.949.533.385	211	136,20	Dinas Ketahanan Pangan	

TABEL T-C.19 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2024 KOTA MAKASSAR

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 X 100%		10 = 6+8		11= 10/5 x 100%		11	12
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100		91,9		100		100		100		191,9		191,90			
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90		89		90		100		111,11		189		210			

TABEL T-C.19 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2024 KOTA MAKASSAR

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA A PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 X 100%		10 = 6+8		11= 10/5 x 100%		11	12
	2	0	0	0	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	94	247,93 8,000	0	0	91	4.500.000	130,6 7	4.500.000	143,5 9	100	130,67	4.500.000	139,01	1,81		
	2	0	0	0	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Perkapita	27 00	5,847, 167,00 0	2716	260 0	16.030.040.2 00	2782	15.217.255.0 19	107	94,93	5498	30.053.024.055	203,62	513,97			
						Ketersediaan Protein Perkapita	12 6		73.7 1	126		80,69		64,03		154,40		122,53				
						Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	50 0		491	500		619		123,8		1110		222				

TABEL T-C.19 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2024 KOTA MAKASSAR

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7 X 100%		10 = 6+8		11= 10/5 x 100%		11	12
					Skor Pola Pangan Harapan	90		83.9		82		89,60		109,26		173,50		192,77			
	2	0	0	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	5,88	217,341,000	23,52	449,027,820	17,64	334,150,800	17,64	312,887,534	100	93.64	41,16	761,915,354	700	350,56		
	2	0	0	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	328,383,000	100	596,028,700	100	1,413,065,150	100	1,376,178,481	100	97,39	200	1,972,207,181	200	600,58		

Rencana Akhir RKPD Perubahan TA. 2024

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPPA - BELANJA SKPD		
Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024										
Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan										
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan										
Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	Persen
1	2	3	4	5			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KETAHANAN PANGAN										
2					Dinas Ketahanan Pangan		24.555.363.432,00	15.866.712.670,00	(8.688.650.762,00)	(35,38)
2	2.09				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN		24.555.363.432,00	15.866.712.670,00	(8.688.650.762,00)	(35,38)
2	2.09	01			PELAYANAN DASAR		24.555.363.432,00	15.866.712.670,00	(8.688.650.762,00)	(35,38)
2	2.09	01	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		8.695.297.632,00	7.414.787.270,00	(1.280.510.362,00)	(14,73)
2	2.09	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
2	2.09	01	2.01	01	KABUPATEN/KOTA					
2	2.09	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		217.170.100,00	163.788.500,00	(53.381.600,00)	(24,58)
2	2.09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	147.273.500,00	102.273.500,00	(45.000.000,00)	(30,56)
2	2.09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA MAKASSAR/UJUNG PANDANG/BULOGADING	12.091.400,00	10.209.900,00	(1.881.500,00)	(15,56)
2	2.09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	12.298.500,00	9.954.000,00	(2.344.500,00)	(19,06)
2	2.09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	10.573.300,00	8.795.500,00	(1.777.800,00)	(16,81)
2	2.09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	10.583.300,00	10.155.500,00	(427.800,00)	(4,04)
2	2.09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	24.350.100,00	22.400.100,00	(1.950.000,00)	(8,01)
2	2.09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.285.061.132,00	5.409.590.370,00	(875.470.762,00)	(13,93)
2	2.09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	5.810.530.732,00	4.935.059.970,00	(875.470.762,00)	(15,07)
2	2.09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	268.080.000,00	268.080.000,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	188.645.700,00	188.645.700,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00	0,00	0,00	0
2	2.09	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	8.878.000,00	8.878.000,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0,00	0,00	0,00	0
2	2.09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	8.926.700,00	8.926.700,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0,00	0,00	0,00	0
2	2.09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.144.917.500,00	793.259.500,00	(351.658.000,00)	(30,71)

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	Persen
1	2	3	4	5			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	200.047.100,00	149.474.100,00	(50.573.000,00)	(25,28)
2	2.09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	153.663.000,00	84.663.000,00	(69.000.000,00)	(44,90)
2	2.09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	5.867.400,00	5.867.400,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	496.000.000,00	266.000.000,00	(230.000.000,00)	(46,37)
2	2.09	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	289.340.000,00	287.255.000,00	(2.085.000,00)	(0,72)
2	2.09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	0,00	0,00	0
2	2.09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		389.052.900,00	389.052.900,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00	0,00	0,00	0
2	2.09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	330.852.900,00	330.852.900,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		164.096.000,00	164.096.000,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		31.916.000,00	31.916.000,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		74.990.000,00	74.990.000,00	0,00	0,00
2	2.09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		57.190.000,00	57.190.000,00	0,00	0,00
2	2.09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		52.000.000,00	48.000.000,00	(4.000.000,00)	(7,69)
2	2.09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		52.000.000,00	48.000.000,00	(4.000.000,00)	(7,69)
2	2.09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	52.000.000,00	48.000.000,00	(4.000.000,00)	(7,69)
2	2.09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		14.884.105.500,00	7.611.265.700,00	(7.272.839.800,00)	(48,86)
2	2.09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		581.217.500,00	455.817.500,00	(125.400.000,00)	(21,58)
2	2.09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	171.634.900,00	132.934.900,00	(38.700.000,00)	(22,55)
2	2.09	03	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	189.477.200,00	158.777.200,00	(30.700.000,00)	(16,20)
2	2.09	03	2.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	220.105.400,00	164.105.400,00	(56.000.000,00)	(25,44)
2	2.09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		327.200.800,00	324.400.800,00	(2.800.000,00)	(0,86)
2	2.09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	327.200.800,00	324.400.800,00	(2.800.000,00)	(0,86)
2	2.09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		13.975.687.200,00	6.831.047.400,00	(7.144.639.800,00)	(51,12)
2	2.09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	96.300.000,00	54.300.000,00	(42.000.000,00)	(43,61)
2	2.09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	13.532.437.200,00	6.429.797.400,00	(7.102.639.800,00)	(52,49)

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	Persen
1	2	3	4	5			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	346.950.000,00	346.950.000,00	0,00	0,00
2	2.09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		413.233.000,00	354.833.000,00	(58.400.000,00)	(14,13)
2	2.09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		181.099.000,00	138.699.000,00	(42.400.000,00)	(23,41)
2	2.09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	181.099.000,00	138.699.000,00	(42.400.000,00)	(23,41)
2	2.09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		232.134.000,00	216.134.000,00	(16.000.000,00)	(6,89)
2	2.09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	75.367.600,00	59.367.600,00	(16.000.000,00)	(21,23)
2	2.09	04	2.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	156.766.400,00	156.766.400,00	0,00	0,00
2	2.09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		510.727.300,00	437.826.700,00	(72.900.600,00)	(14,27)
2	2.09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		510.727.300,00	437.826.700,00	(72.900.600,00)	(14,27)
2	2.09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	166.974.100,00	122.673.500,00	(44.300.600,00)	(26,53)
2	2.09	05	2.01	07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	310.674.300,00	282.074.300,00	(28.600.000,00)	(9,21)
2	2.09	05	2.01	09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	KOTA MAKASSAR/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	33.078.900,00	33.078.900,00	0,00	0,00
JUMLAH							24.555.363.432,00	15.866.712.670,00	(8.688.650.762,00)	(35,38)